



Judul : Bijak gunakan medsos, tindak tegas pelaku ujaran kebencian
Tanggal : Kamis, 18 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 10

Bijak Gunakan Medsos Tindak Tegas Pelaku Ujaran Kebencian

ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap setiap bentuk ujaran kebencian dan penghinaan yang dilakukan melalui media sosial (medsos). Ruang digital tidak boleh dijadikan tempat bebas untuk menghina kelompok tertentu. Apalagi yang menyangkut identitas kultural dan komunitas masyarakat.

Diketahui, selebritas medsos atau YouTuber MAF alias R, diduga melakukan penghinaan terhadap suporter tim sepak bola Persib Bandung dan masyarakat Suku Sunda melalui medsos. Namun, setelah video siaran langsungnya viral dan menimbulkan kemarahan banyak pihak, R mengeluarkan permintaan maaf melalui video klarifikasi.

Dia mengaku ucapannya yang menghina tersebut dilakukan saat dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh alkohol.

"Saya mengakui bahwa saya telah melukai perasaan banyak pihak, terutama masyarakat Sunda dan Viking Persib," ungkapnya.

Oleh melanjutkan, ujaran yang mengarah pada penghinaan terhadap suporter sepak bola maupun masyarakat suku tertentu berpotensi memicu kemarahan, konflik sosial, dan perpecahan di tengah masyarakat. Sehingga, proses hukum harus dilakukan secara profesional dan transparan.

Selain itu, dia mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan medsos. Kebebasan berekspresi harus disertai dengan tanggung jawab dan etika. Artinya, jangan seenaknya menghina dan menyebarkan kebencian.

"Karena itu akan menyakitkan pihak lain dan berpotensi menimbulkan kemarahan dan perpecahan," ujar legislator asal dapil Jawa Barat (Jabar).

Oleh berharap, kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh pengguna medsos agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya di ruang digital. "Juga menjunjung tinggi nilai saling menghormati dan persatuan bangsa," tandas mantan anggota DPRD Jabar ini.

Anggota Komisi III DPR Rizki Faisal menambahkan, permintaan maaf semata tidak dapat dijadikan solusi atas tindakan rasisme dan ujaran kebencian di medsos. Sebab, ujaran kebencian yang menyerang identitas suku telah melampaui batas kebebasan berekspresi.

"Ini bukan lagi soal pendapat pribadi, melainkan serangan terhadap kelompok masyarakat yang dilindungi oleh hukum," ujar Rizki dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Rizki menegaskan, tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan melalui proses pembuatan konten yang disengaja. Sehingga, penyelesaian kasus tidak boleh berhenti hanya pada permintaan maaf yang tidak serta merta menghapus proses hukum.

"Jika hukum dilemahkan hanya karena permintaan maaf, maka fungsi hukum sebagai penjaga keadilan dan pelindung masyarakat akan tergerus," kritik politikus Golkar ini.

Untuk itu, Rizki mendesak Polri untuk segera melakukan pendalaman kasus secara profesional, objektif, dan transparan. Hal ini dilakukan demi menjamin kepastian hukum dan mencegah terulangnya tindakan serupa di ruang digital. ■ TIF